

ANALISIS PERMASALAHAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Dini Rakhmawati

Suwarno Widodo

Mujiyono

Universitas PGRI Semarang

e-mail: dinirakhmawati@upgris.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<i>Sejarah artikel</i> Diterima September 2017 Disetujui Nopember 2017 Dipublikasikan Desember 2017	Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan tata nilai/norma yang dianut dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi setiap individu dalam masyarakat. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan penunjang pembangunan berwawasan kependudukan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini melibatkan sembilan PIK R yang mewakili sembilan kecamatan dari enam belas kecamatan di kota Semarang. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PIK R untuk mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain kurang intensifnya pendampingan dari dinas, kurangnya sosialisasi mengenai panduan dokumen yang harus diikuti dan dilengkapi di PIK R, distribusi dana kegiatan tidak merata, kurang adanya dukungan dari masyarakat, kesulitan dalam melakukan regenerasi, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana.
Kata Kunci: <i>PIK R, Masyarakat berwawasan kependudukan</i> Keywords: <i>PIK R, Population-oriented societies</i>	

Abstract

Population-oriented societies have a meaning to believe that fertility, mortality and migration must be carefully considered through reasoning and conscience in order to provide meaningful meaning to family, community, nation and state life. Population-oriented life behavior is the norm / value adopted in life and is expected to be a character for every individual in society. Population-based life behavior is the support of population-oriented development. This research uses qualitative research design. Qualitative research is descriptive research and tend to use analysis. Theoretical basis is used as a guide to focus the research in accordance with the facts in the field. The study involved nine PIK R representing nine sub-districts of sixteen sub-districts in Semarang. Based on observation, interviews, and documentation. Some problems that arise in the management of PIK R to realize population-oriented society, among others, the absence of mentoring from the service, no document guidance to be followed and completed in PIK R, uneven distribution of activity funds, lack of support from the community, difficulties in regeneration, IEC (communication, information and education) services on reproductive health have not run smoothly due to limited personnel and facilities.

DOI: <https://doi.org/10.24176/jkg.v3i2.2087>

© 2017 Universitas Muria Kudus

Print ISSN 2460-1187

Online ISSN 2503-281X

PENDAHULUAN

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030, artinya penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia punya modal sumber daya yang kuat pada penduduk usia produktif, terutama bagi generasi muda, sebagai engine of growth, artinya generasi muda Indonesia berpeluang untuk membangun pondasi yang kokoh bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 (Rakhmawati, 2016).

Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan tercapainya bonus demografi tahun 2020-2030, mulai dari bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Pemerintah bersama BKKBN sedang berupaya cukup serius mengkampanyekan program masyarakat berwawasan kependudukan. Masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa pembangunan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan maka harus diciptakan suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu menerapkan perilaku hidup yang berwawasan kependudukan. Masyarakat

berwawasan kependudukan maksudnya meyakini bahwa fertilitas, mortalitas dan migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama melalui penalaran akal dan hati nurani agar dapat memberi makna yang berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Intinya dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sudah mempertimbangkan aspek kependudukan. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan tata nilai/norma yang dianut dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi setiap individu dalam masyarakat. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan penunjang pembangunan berwawasan kependudukan.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Adapun kebijakan dan strategi yang dapat diambil yakni revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang terjangkau, dan bermutu dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, Pembinaan kemandirian ber KB, serta Peningkatan promosi dan penggerakkan masyarakat. Program prioritas yang dapat dilakukan melalui Advokasi dan KIE program KB, peningkatan program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas (Usman, 2015)

Terkait dengan kebijakan dan strategi tentang program kesehatan reproduksi remaja, bahasan terhadap kesehatan reproduksi meliputi seluruh siklus kehidupan manusia, sejak masa konsepsi sampai dengan masa lanjut usia. Jika demikian maka kesehatan reproduksi pada masa remaja perlu juga dipahami sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus dilalui setiap manusia, dan sebagai upaya untuk melindungi remaja

dari tiga kemungkinan resiko buruk atau triad KRR yang dihadapi yaitu resiko yang berkaitan dengan seks pra nikah, Napza, HIV/AIDS, sekaligus membentuk sikap dan perilaku hidup remaja berwawasan kependudukan.

Menyiapkan remaja yang berkualitas mencakup seluruh dimensi kehidupan, diantaranya adalah membiasakan remaja untuk memiliki perilaku hidup berwawasan kependudukan. sebagai upaya memberdayakan remaja agar peduli untuk tahu, mau dan mampu mempraktekkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kehidupan berwawasan kependudukan serta berperan aktif dalam program keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, BKKBN telah memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja atau dikenal PIK-R di sekolah-sekolah maupun luar sekolah. PIK-R sudah berkembang di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, namun belum berkembang dengan baik di desa-desa atau kecamatan. Berdasar data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Kota Semarang terdapat 79 PIK R yang telah terbentuk di 16 Kecamatan di Kota Semarang, namun hanya beberapa yang masih aktif dan sebagian lainnya hanya aktif pada saat pembentukan. Hal ini menunjukkan pentingnya kita menganalisis permasalahan PIK R yang berkembang di kelurahan atau kecamatan di Kota Semarang dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan.

METODE

Penelitian ini mengambil setting lokasi di PIK Remaja Masyarakat yang sudah berkembang di beberapa kecamatan di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penentuan subjek berupa person dilakukan dengan teknik purposive berdasar wilayah, sembilan PIK R Masyarakat di Kota Semarang dijadikan sampel mewakili 9 kecamatan dari 16 kecamatan yang dipilih berdasar kondisi geografis yaitu daerah pantai, kota, dan gunung. Subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data-data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber berupa place dibutuhkan untuk memperkaya data penelitian melalui observasi.

Mengacu pada panduan penelitian kualitatif Miles & Huberman (dalam Satori & Komariah, 2017), strategi analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan terdiri dari tiga tahap, yaitu a) Reduksi data dengan kegiatan memilah data berdasar satuan konsep, tema, kategori untuk kemudian dilakukan koding, b) penyajian data melalui bagan, hubungan antar kategori dan teks naratif, dan c) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

PIK R Duta Kusuma Bhakti ini adalah salah satu PIK R yang pengelolaannya berjalan sesuai dengan panduan pengelolaan PIK R tahun 2015. Pengelolaan PIK R yang baik terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di sekretariat PIK R Duta Kusuma Bhakti yang antara lain menunjukkan: tempat / kantor ada, ruang tamu ada, papan catatan kegiatan ada, buku materi perencanaan keluarga ada, buku materi triad krr ada, buku materi keterampilan hidup ada, buku pedoman promosi kesehatan reproduksi ada, buku materi kesehatan reproduksi ada, lembar balik kesehatan reproduksi ada, poster dan leaflet kesehatan reproduksi ada, ruang konseling individual ada, ruang konseling kelompok tidak ada, papan nama ada, perpustakaan ada, genre kit ada, laptop ada, data jaringan dan kemitraan ada, buku tamu ada. Masyarakat di sekitar PIK R Duta Kusuma Bhakti tergolong memiliki wawasan kependudukan yang cukup baik terbukti di wilayah tersebut terdapat program kemandirian ber KB dan

program ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui PKK, Dawis, dan kelompok-kelompok pengajian. Program Kesehatan Reproduksi Remaja melalui PIK R dan Karang Taruna juga berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi masih terbatas secara individual karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tersebut.

PIK R Mlatikologi merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan Semarang Timur yang beralamat di Jl.Mlatibaru No.1 Kota Semarang. Pada rekam kegiatan dokumentasi PIK R Mlatikologi ini telah melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Terbukti kelompok karang taruna dan ikatan remaja masjid (IRMA) sebagian besar juga ikut tergabung ke dalam kelompok PIK R Mlatikologi. Terkait sosialisasi, PIK R Mlatikologi ini telah mengkomunikasikan pembentukan dan keberadaan PIK R Mlatikologi kepada stakeholders, mitra kerja, dan remaja. Dalam hal ini PIK R Mlatikologi mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder contohnya lokasi kegiatan PIK R Mlatikologi bertempat di rumah RW 6 Mlatibaru bahkan sering mendapatkan fasilitas dari masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Permasalahan lain pada pengelolaan PIK R dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah pelayanan KIE tentang kesehatan reproduksi masih belum berjalan dengan lancar karna keterbatasan personil dan sarana prasarana, kemudian dukungan dari masyarakat yang masih kurang peduli dengan program kesehatan reproduksi remaja.

Dibentuk tanggal 5 Maret 2015 kemudian disahkan tanggal 26 Agustus 2015, PIK R replika mendadak naik daun di awal tahun 2017 karena PIK R ini berhasil menjadi juara 1 di ajang kreatif tingkat nasional. PIK R Replika ini merupakan salah satu dari tiga PIK R yang pengelolanya sudah berjalan sesuai

dengan panduan bahkan pengembangan life skillnya sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan adanya ragam kegiatan yang dilakukan oleh PIK R Replika diantaranya menyiapkan dan menyampaikan materi advokasi melalui media massa (radio), sharing informasi bagi temansebayanya, promosi dan sosialisasi melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan remaja masjid meskipun dana yang tersedia masih secara swadaya dari lingkungan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan analisis angket yang diberikan pada anggota dan pengurus PIK Replika yang menunjukkan PIK R ini telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti konseling, pelatihan dan kegiatan untuk mengmbangkan bakat dan minat. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), mendapatkan dukungan sumber dana PIK R, menyiapkan dan memberdayakan SDM pengelola PIK R, mengembangkan sistem rujukan, ada jadwal piket konselor dan terdapat pencatatan serta pelaporan secara jelas. Masalah regenerasi lagi lagi menjadi masalah serius dalam pengelolaan PIK R dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan.

PIK R Mukti Karya Utama merupakan salah satu PIK R yang berada di kecamatan Genuk yang beralamat di Jl.Muktiharjo Raya Kota Semarang. PIK R Mukti Karya Utama ini dibentuk pada tanggal 14 Januari 2015. Pada rekam kegiatan dokumentasi PIK R Mukti Karya Utama ini telah melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Terkait sosialisasi, PIK R Mukti Karya Utama ini belum mampu mengkomunikasikan dengan baik keberadaan PIK R Mukti Karya Utama kepada stakeholders, mitra kerja, dan remaja meskipun konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh dukungan/persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R Mukti Karya Utama sudah ada. Pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pengurus PIK R Mukti Karya Utama ini menyatakan bahwa pengembangan PIK R ini terus dilakukan meskipun memang masih belum sepenuhnya

sesuai dengan buku panduan yang ada tentang mekanisme pengelolaan PIK R. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan sarana dan prasarana.

PIK R Irjasari ini adalah salah satu PIK R yang belum memiliki SK. Kegiatan di PIK R ini berjalan seadanya karena memang fasilitas yang dimiliki pun seadanya. Pengelolaan PIK R ini masih jauh dari panduan pengelolaan PIK R tahun 2015. PIK R Irjasari Mijen ini cukup unik karna meskipun mereka sudah melakukan beberapa kegiatan, PIK ini belum memiliki SK, dan hal tersebut yang membuat para pengurus PIK melakukan pelayanan secara setengah setengah selain itu masalah regenerasi, keterbatasan sarana prasarana juga diindikasikan menjadi penyebab pelayanan PIK R belum berjalan secara optimal.

Pada rekam kegiatan dokumentasi PIK R Kekal ini belum melakukan identifikasi sasaran kepada sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/ keagamaan, dan organisasi kepemudaan sehingga konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh dukungan/persetujuan tentang rencana pembentukan PIK R Kekal tidak berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan sarana dan prasarana.

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua ditemukan bahwa PIK R Adi Brata Luhur belum melakukan proses sosialisasi dengan baik. Terbukti banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai kegiatan PIK R Adi Brata Luhur yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana dan prasarana PIK R Adi Brata Luhur didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi keberlangsungan kegiatan PIK R belum lengkap karena masih ikut berkantor

di kelurahan. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna masalah regenerasi dan keterbatasan sarana dan prasarana.

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan pada pengurus, anggota, maupun orangtua ditemukan bahwa PIK R Sekayu belum melakukan proses sosialisasi dengan baik. Terbukti banyak remaja yang ada di daerah sekitar belum mengetahui tentang berbagai kegiatan PIK R Sekayu yang sudah dilakukan. Observasi dilakukan pada sarana dan prasarana PIK R Sekayu didapatkan bahwa fasilitas yang menjadi keberlangsungan kegiatan PIK R ini belum lengkap dan belum memiliki tempat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pengurus PIK R Sekayu ini menyatakan bahwa pengembangan PIK R ini terus dilakukan meskipun memang masih belum sepenuhnya sesuai dengan buku panduan yang ada tentang mekanisme pengelolaan PIK R yang baik bahkan kegiatan yang berjalan terkesan seadanya saja. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karna keterbatasan personil, dukungan masyarakat, serta sarana dan prasarana.

PIK R murni ini sempat vakum beberapa lama karena berpindahnya posko karena kebocoran. Peralatan ada beberapa yang rusak karena bocor di posko sebelumnya. Saat ini posko PIK R murni pindah di PAUD candisari. Hasil observasi yang dilakukan di PIK R Murni adalah sebagai berikut: tempat / kantor tidak ada, ruang tamu tidak ada, papan catatan kegiatan ada, buku materi perencanaan keluarga tidak ada, buku materi triad krr ada, buku materi keterampilan hidup ada, buku pedoman promosi kesehatan reproduksi ada, buku

materi kesehatan reproduksi ada, lembar balik kesehatan reproduksi ada, poster dan leaflet kesehatan reproduksi ada, ruang konseling individual ada, ruang konseling kelompok tidak ada, papan nama ada, perpustakaan tidak ada, genre kit ada, laptop tidak ada, data jaringan dan kemitraan ada, buku tamu tidak ada. Beberapa permasalahan PIK R yang muncul dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain masalah regenerasi dan pelayanan KIE yang belum berjalan dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Pembahasan

Beberapa kebijakan dan strategi yang diambil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antarlain dengan melakukan revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang terjangkau, dan bermutu dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, pembinaan kemandirian ber KB, serta Peningkatan promosi dan penggerakkan masyarakat. Program prioritas yang dapat dilakukan melalui Advokasi dan KIE program KB, peningkatan program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Terkait dengan kebijakan dan strategi tentang program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja yang berkualitas mencakup seluruh dimensi kehidupan, diantaranya adalah membiasakan remaja untuk memiliki perilaku hidup berwawasan kependudukan. sebagai upaya memberdayakan remaja agar peduli untuk tahu, mau dan mampu mempraktekkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kehidupan berwawasan kependudukan serta berperan aktif dalam program keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di masyarakat. BKKBN telah memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja atau dikenal PIK-R di sekolah-sekolah maupun luar

sekolah. PIK R masyarakat merupakan PIK R yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengurus dan pengelola berada di rentang usia remaja yang mayoritas masih bersekolah atau kuliah. Para pengurus dan pengelola memperoleh dukungan dari orang tua selama kegiatan PIK R tidak mengganggu kegiatan sekolah atau kuliah. Orang tua juga memantau kegiatan anak-anak selama bergabung di PIK R. Hanya saja, ternyata ada orang tua dari sekelompok PIK R yang tidak mengetahui bahwa anak bergabung di PIK R karena PIK R tidak berjalan dengan baik.

Dukungan masyarakat terhadap PIK R bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap keberadaan PIK R dan kesadaran masyarakat tentang wawasan kependudukan. Pada beberapa masyarakat tidak mengetahui keberadaan PIK R, tidak ada dukungan dari masyarakat terhadap pengelolaan PIK R. Meski demikian, ada pula wilayah yang sangat mengenali keberadaan PIK R mereka sangat memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja sehingga masyarakat mendukung kepengurusan PIK R dengan pemberian bantuan konsumsi dan fasilitas untuk berkegiatan. Masyarakat juga membantu memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain.

Dukungan dinas PLKB terhadap pengelolaan PIK R belum merata. PLKB intens memberikan arahan hanya terbatas saat pembentukan PIK R. Pada pelaksanaannya, sebagian PIK R tidak mendapat pendampingan selain saat pembentukan yang membuat pengelola PIK R merasa diabaikan dan dilepaskan. Di tempat yang lain, dinas PLKB juga telah mendukung kegiatan PIK R di beberapa tempat dan menyediakan diri sebagai nara sumber untuk menjawab pertanyaan dari pengelola PIK R.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolan PIK R untuk mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain tidak adanya pendampingan dari dinas, tidak ada panduan dokumen yang harus diikuti dan dilengkapi di PIK R,

distribusi dana kegiatan tidak merata, kesulitan dalam melakukan regenerasi, kurang adanya dukungan dari masyarakat, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana.

KESIMPULAN

Penelitian ini melibatkan sembilan PIK R yang mewakili sembilan kecamatan dari enam belas kecamatan di kota Semarang. Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa permasalahan yang

muncul dalam pengelolaan PIK R untuk mewujudkan masyarakat berwawasan kependudukan antara lain kurang intensifnya pendampingan dari dinas, kurangnya sosialisasi mengenai panduan dokumen yang harus diikuti dan dilengkapi di PIK R, distribusi dana kegiatan tidak merata, kurang adanya dukungan dari masyarakat, kesulitan dalam melakukan regenerasi, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi belum berjalan dengan lancar karena keterbatasan personil dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2015). *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIKR/M)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2015). *Rencana Staregis Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (Renstra BKKBN) 2015-2019*. Diakses melalui BKKBN.go.id.
- BKKBN. (2015). *Peraturan Kepala BKKBN Nomor 456/PER/F6/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*.
- BPS. (2013). *Indonesia's National Socioeconomic Survey (SUSENAS) 2012*. Jakarta: Indonesia.
- Rakhmawati, D. (2016). *Resiliensi Remaja Dan Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko. Resiliensi Remaja Dan Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko*. Disampaikan dalam Seminar Nasional BK dengan tema "Konseling Teman Sebaya untuk Mencegah Perilaku Berisiko pada Remaja" pada tanggal 29 September 2016, Universitas PGRI Semarang.
- Satori, D & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Usman. (2015). *Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Diakses melalui <http://sumbar.bkkbn.go.id>.

GUSJIGANG
JURNAL KONSELING